

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 70/Pid.Sus/2022/PN.Trg)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum di Universitas Satya Negara Indonesia**



**UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

### **Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Putusan No. 70/Pid.Sus/2022/PN. Trg)**

Oleh :  
**Virda Aprilia**  
**181200014**

UUD 1945 menyebutkan, Negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*matctstaat*), yang mempunyai arti bahwa negara termasuk didalam perangkat pemerintah serta Lembaga Negara yang ada dalam pelaksanaan segala tindakan harus dilandasi oleh Hukum atau harus di pertanggungjawabkan secara hukum. Tindak Pidana kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan di bidang seksual yang melanggar norma kesusilaan dan sangat meresahkan masyarakat, hal ini bertentangan dengan tujuan Pemerintah dalam menciptakan Masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera. Maka mengenai penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak dalam keluarga telah terdapat peraturan yang mengaturnya selain dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam penelitian ini dibahas permasalahan mengenai dasar pertimbangan Hakim dan Penerapan hukum apakah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam putusan perkara Nomor 70/Pid.Sus/2022/Pn. Trg berupa sanksi 11 (sebelas) Tahun dan denda sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila dengan tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara 3 (tiga) bulan. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif merupakan penelitian terhadap data sekunder. hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dan penerapan hukum apa sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan, dalam menjatuhkan pidana penjara 11 tahun sudah sesuai menggunakan pasal 81 ayat 1 Jo. 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tetapi dalam penjatuhan hukuman hakim belum menggunakan hukuman maksimal 15 tahun penjara dikarenakan atas dasar pertimbangan hakim melihat dari keadaan yang meringankan terdakwa, dengan tujuan pemidanaan sebagai pembelajaran dan efek jera agar terdakwa tidak mengulangi kesalahan dan perbuatan yang sama.

**Kata kunci :** Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Sanksi yang ada di Indonesia, Anak dalam keluarga

## **Abstract**

### ***Juridical Analysis Criminal Act of Sexual Violence Against Children in the Family (Case Study Decision No. 70/Pid.Sus/2022/PN. Trg)***

**By :**  
**Virda Aprilia**  
**181200014**

*The 1945 Constitution states that the State of Indonesia is based on law (Rechtsstaat) and not based on mere power (machtstaat), which means that the state is included in the government apparatus and state institutions that exist in the implementation of all actions must be based on law or must be carried out in accordance with the law. . law. The crime of sexual violence is one of the crimes in the sexual field that violates moral norms and is very disturbing to the community, this is contrary to the government's goal of creating a safe, peaceful, and prosperous society. So regarding the application of the law to perpetrators of criminal acts of violence in the family, there are regulations that regulate it apart from the Criminal Code (KUHP), namely Law no. 35 of 2014 concerning child protection. This study discusses the issues regarding the basis of the judge's consideration and the application of the law whether it is in accordance with the punishment in the case decision Number 70/Pid.Sus/2022/Pn. Trg in the form of sanctions of 11 (eleven) years and a fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) if there is no replacement, it will be replaced with 3 (three) months imprisonment. This thesis research uses a normative research method which is a study of secondary data. the results of the study it can be said that the basis for judge's considerations and the application of the law is in accordance with the punishment, in imposing a prison sentence of 11 years is in accordance with article 81 paragraph 1 Jo. 76D Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. But in sentencing the judge has not used a maximum sentence of 15 years in prison due to considerations of mitigating circumstances, with the aim of assessing, with learning and a deterrent effect so as not to repeat the same mistakes and actions.*

**Keywords:** *Sexual Violence, Sanctions in Indonesia, Children in the family*